

# **PENGAWASAN PENCEMARAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS LIMBAH INDUSTRI KELAPA SAWIT DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**

**Oleh: Muhammad Sulaiman**

**Pembimbing : Zaili Rusli SD**

Program Studi Administrasi Publik – Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R Soebrantas Km 12,5 Simp, Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

## ***Abstract***

*Industrial development is now increasingly rapid which is followed by the advancement of science and technology. developments in the industrial sector also have a negative impact, namely in the form of industrial waste which if not managed properly in accordance with the SOP that has been determined will have an impact on environmental balance. Can be seen from the occurrence of problems of air pollution, water pollution, and land pollution. Considering the high potential of pollution caused by the waste of the oil palm industry, which if not properly managed by the waste, supervision is needed on the management of this industrial waste. Monitoring of industrial waste is carried out so that there are no deviations that can cause environmental pollution. The supervision at the Environmental Agency in Indragiri Hulu Regency is still not optimal. The purpose of this study is to see how the environmental pollution is monitored (a case study of palm oil industry waste in Indragiri Hulu Regency) and what are the factors that become obstacles to supervision in the Indragiri Hulu Regency Environmental Agency. This research was conducted in Indragiri Hulu Regency. The theory used in this study is the Manullang theory which has three supervisory indicators, namely setting standards, taking assessment actions, and carrying out corrective actions. The results of this study indicate that the supervision of the Department of Environment is still not optimal, the lack of socialization and the standard time in conducting direct supervision of the field which is still considered ineffective and also the factors that inhibit supervision by the Environmental Agency of Indragiri Hulu Regency are human resources, funds or costs and community participation.*

***Keywords*** : *Supervision, Environmental Agency*

## 1.1 Latar Belakang

Kabupaten Indragiri Hulu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang mengandalkan perkebunan salah satunya kelapa sawit sebagai komoditas unggulan daerah. Kelapa sawit merupakan komoditas perkebunan yang berperan penting bagi perekonomian Kabupaten Indragiri Hulu sebagai salah satu penyumbang devisa dari sektor non migas. Produk minyak kelapa sawit diserap oleh industri pangan terutama minyak goreng dan industri non pangan seperti kosmetik, farmasi, dan lain-lain.

Perkembangan industri sawit yang menggunakan teknologi dan menggunakan peralatan juga berdampak pada lingkungan sekitar. Hal tersebut yang mendukung penggunaan peralatan atau mesin dan bahan-bahan kimia dalam proses produksi untuk menghasilkan produk atau jasa yang bagus agar dapat bersaing di pasaran. Namun, disisi lain kemajuan dan perkembangan tersebut memicu berbagai masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3), seperti bertambahnya sumber bahaya, meningkatnya potensi bahaya, penyakit akibat kerja di tempat kerja. Sebagaimana tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu yaitu salah satunya Melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang dimana disini masih belum optimal hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup terhadap perusahaan industri kelapa sawit secara langsung hanya sekali dalam setahun dan tidak semua perusahaan yang diawasi.

Dinas Lingkungan Hidup menjadi salah satu faktor yang menentukan dalam keberhasilan kelestarian lingkungan hidup. Hal ini di perlukan kerjasama berbagai pihak dalam mengawasi lingkungan baik dari Pemerintah, wakil rakyat, anggota perdagangan, masyarakat dan organisasi non pemerintah yang merupakan suatu lembaga atau institusi yang di selenggarakan oleh masyarakat yang sepatutnya secara bersama-sama perlu mempunyai komitmen terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap limbah cair ada 2 yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan secara langsung. Pengawasan administrasi ini antara lain yaitu pengawasan terhadap izin pembuangan air limbah, pengawasan izin land application dan pengawasan izin limbah B3. Pengawasan ini sangat penting dilakukan mengingat dampak yang ditimbulkan akibat penyimpangan yang terjadi dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk itu Pemerintah memberikan izin untuk pembuangan hasil limbah cair ke tempat pembuangan limbah ke sumber air.

Pengawasan ketaatan pembuangan air limbah ke sumber air oleh Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Indragiri Hulu masih tergolong rendah. Pengawasan langsung terhadap limbah industri secara berkala hanya dilakukan satu tahun sekali yang dimana industri yang di awasi dalam setahun tidak semuanya, masih banyak terdapat industri-industri yang melakukan tindakan penyimpangan yang tidak sesuai dengan SOP, sementara pengawasan tidak langsung dilakukan tiga bulan sekali dalam bentuk data yang

diberikan oleh perusahaan ke Dinas Lingkungan Hidup masih ada keterlambatan. Berdasarkan fenomena atau latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas skripsi dengan judul “ **Pengawasan Pecemaran lingkungan (Studi Kasus Limbah Industri Sawit Di Kabupaten Indragiri Hulu)** ”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan Pecemaran Lingkungan (Studi Kasus Limbah Industri Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu) ?
2. Apa faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Pecemaran Lingkungan (Studi Kasus Limbah Industri Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu) ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk Pengawasan Pecemaran Lingkungan (Studi Kasus Limbah Industri Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam Pengawasan Pecemaran Lingkungan (Studi Kasus Limbah Industri Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian mengenai masalah ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  1. teori-teori yang di dapat selama perkuliahan dalam memecahkan masalah dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut.
  2. Sebagai bahan perkembangan disiplin Ilmu Administrasi publik khususnya dibidang pengawasan.
- b. Secara Praktis
  1. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.
  2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

## **1.5 Konsep Teori**

### **1. Pengawasan**

pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam tujuan-tujuan organisasi, menurut Jerry H Makawimbang (2012 :7). Dilanjutkan lagi dengan pendapat Edward (2011 :8) pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apapun suatu persetujuan, yang disesuaikan dengan

instruksi dan prinsip perencanaan, yang sudah tidak dapat dipungkiri lagi. Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen ialah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut Admosudirdjo dalam Andri Feryanto dan Endang Shyta Triana (2015 :63), pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Brantas (2009 :195) adapun langkah-langkah proses pengawasan melalui beberapa tahapan sebagai berikut yaitu

1. Menentukan standar yang akan digunakan sebagai dasar pengawasan.
2. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai.
3. Melakukan tindakan perbaikan, jika terdapat penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Menurut Manullang (2015;177) berdasarkan waktu pengawasan dilakukan, maka pengawasan dapat dibedakan menjadi :

- a. pengawasan *preventif* dimaksudkan pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau *deviation*.
- b. Pengawasan *repressif*

dimaksudkan pengawasan setelah rencana sudah dijalankan dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Pengawasan juga dibedakan menurut objek pengawasan, menurut Beishline dalam Manullang (2015;177) pengawasan menurut objek pengawasan dibedakan atas:

1. Kontrol administratif yaitu berurusan dengan tindakan dan pikiran.
2. Kontrol operatif yaitu untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan.

Menurut Kartono (2002:153) Pengawasan melekat adalah kegiatan mengamati, observasi menilai, mengarahkan pekerjaan, wewenang yang diserahkan oleh atasan terhadap bawahannya sehingga dapat diberikan sanksi terhadap bawahan secara struktural, yang dilakukan secara kontiniu dan berkesinambungan. indikator pengawasan yang akan dipergunakan dalam pengukuran variabel ini adalah sebagai berikut.

1. Menentukan adanya ukuran pelaksanaan. Artinya cara-cara untuk mengukur pelaksanaan seperti kontiniu atau beberapa syarat minimal melakukan pengawasan dalam suatu waktu seperti satu kali seminggu atau beberapa kali sebulan bahkan mungkin beberapa jam setiap hari.
2. Memberikan penilaian. Artinya memberi nilai kesetiap pekerjaan yang diberikan kepada bawahan, apakah pekerjaannya baik atau buruk.

3. Mengadakan korektif. Tindakan koreksi ini dimaksudkan koreksi internal yaitu mengevaluasi berbagai metode pengawasan yang ada seperti standar yang terlalu tinggi dan eksternal yaitu memberikan sanksi kepada bawahan.

Menurut Terry (2009;395) pengawasan terdiri dari pola suatu proses yang dibentuk oleh macam langkah-langkah yang bersifat universal, yaitu:

1. Mengukur hasil pekerjaan.
2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila ada perbaikan).
3. Mengkoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Handoko(2003;361),mengklasifikasikan tipe pengawasan menjadi tiga tipe, yaitu:

1. pengawasan pendahuluan (*feedforward control*). Pengawasan pendahulu untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar satu tujuan serta memungkinkan koreksi dibuat sebelum tahap kegiatan tertentu selesai.
2. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*). Pengawasan ini, sering dilakukan selama sesuatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau

syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam perlatan “double chock” yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.

3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*). Pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang.

Prinsip-prinsip yang digunakan dalam melaksanakan pengawasan menurut Darwis (2000;31) haruslah berpatokan pada prinsip-prinsip dari *controlling* tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Titik kontrol strategis, kontrol terbaik hanya bisa diperoleh apabila titik-titik kritis didefinisir dan perhatian khusus diuraikan pada penyesuaian titik-titik tersebut
2. Umpan balik, yakni proses pencapaian informasi yang lalu terhadap kegiatan yang akan datang
3. Kontrol yang fleksibel, setiap sistem kontrol harus peka terhadap perubahan kondisi
4. Kesesuaian organisasi, yaitu agar kontrol terpola untuk kebutuhan organisasi
5. Kontrol diri, disini dimaksudkan bahwa tiap unit dapat mengontrol unit itu

sendiri, karena masing-masing unit mempunyai tujuan

6. Kontrol langsung, maksudnya setiap sistem kontrol harus didesain sedemikian untuk memelihara kontak langsung secara pengontrol dengan yang dikontrol.

Pelaksanaan pengawasan yang efektif menurut Handoko (2005;373), yaitu:

1. Akurat. Informasi tentang pelaksanaan kegiatan harus akurat. Data yang tidak akurat dari sistem pengawasan dapat menyebabkan organisasi mengambil tindakan yang koreksi yang keliru atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada.
2. Tepat waktu. Informasi harus dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasi secepatnya bila kegiatan perbaikan harus dilaksanakan segera.
3. Objektif dan menyeluruh. Informasi harus mudah dipahami dan bersifat objektif secara lengkap.
4. Terpusat pada titik-titik pengawasan strategis. Sistem pengawasan harus memusatkan perhatian pada bidang-bidang dimana penyimpangan-penyimpangan dari standar paling sering terjadi atau yang mengakibatkan kerusakan paling fatal.
5. Realistik secara ekonomis. Biaya pelaksanaan sistem pengawasan harus lebih rendah atau paling tidak sama dan kegunaan yang diperoleh dari sistem tersebut.

6. Realistik secara organisasional. Sistem pengawasan harus cocok atau harmonis dengan kenyataan-kenyataan organisasi
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja nasional. Informasi pengawas harus terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, karena (1) setiap tahap dari proses pekerjaan dapat mempengaruhi sukses atau kegagalan keseluruhan operasi dan (2) informasi pengawasan harus sampai pada seluruh penelitian yang memerlukannya
8. Fleksibel. Pengawasan harus memiliki fleksibilitas untuk memberikan tanggapan atau reaksi terhadap ancaman atau kesempatan dari luar.
9. Bersifat sebagai petunjuk operasional sistem pengawasan yang efektif.

Menurut Manullang (2015:184) dalam pelaksanaan tugas pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau urutan pelaksanaan. Proses pengawasan dimanapun atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari beberapa fase sebagai berikut:

1. Menetapkan alat pengukur (standar), alat penilaian atau standar bagi hasil pekerjaan bawahan, pada umumnya terdapat baik pada rencana keseluruhan maupun pada rencana-rencana bagian. Dengan kata lain dalam rencana itulah pada umumnya terdapat standar bagi pelaksanaan pekerjaan.

2. Mengadakan penilaian (*evaluate*). Fase kedua dalam proses pengawasan adalah menilai atau evaluasi. Dengan demikian dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan (*actual result*) dengan alat ukur (standar) yang sudah ditentukan
3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*) Hal pertama yang perlu dianalisis yaitu apa yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Maka perlunya laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas, ketika sudah diketahui apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan barulah tindakan perbaikan diambil.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut maka pengawasan dapat penulis simpulkan sebagai suatu kegiatan atau proses untuk mengawasi, membimbing dan membina unit kerja dalam pelaksanaan suatu kegiatan dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada sehingga tujuan yang diinginkan tercapai.

Jadi dalam melakukan pengawasan bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah di keluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang di hadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat di ambil tindakan-tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun di waktu yang akan datang.

Menurut Arif Zulkifli (2014 : 15) limbah adalah zat atau bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik, yang kehadirannya pada suatu tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena dapat menurunkan kualitas lingkungan.

Menurut Susilowarno (2007 :226) limbah merupakan sisa atau hasil sampingan dari kegiatan programsi manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembuangan limbah yang tidak diolah terlebih dahulu sebelum dibuang kedalam lingkungan akan menyebabkan polusi.

Menurut Kristanto (2013 :227) limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang mengandung bahan polutan yang memiliki sifat racun dan berbahaya dikenal dengan limbah B3, yang dinyatakan sebagai bahan yang dalam jumlah relatif sedikit tetapi berpotensi untuk merusak lingkungan hidup dan sumber daya.

Kualitas limbah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi kualitas limbah adalah sebagai berikut:

- a. Volume limbah, banyak sedikitnya limbah memengaruhi kualitas limbah.
- b. Kandungan limbah, kualitas limbah dipengaruhi oleh kandungan bahan pencemar.
- c. Frekuensi pembuangan limbah, pembuangan limbah dengan frekuensi yang sering akan menimbulkan masalah.

## 2. Limbah

Secara umum, limbah dapat digolongkan berdasarkan faktor, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis limbah berdasarkan wujudnya  
Yang pertama penggolongan limbah berdasarkan wujudnya. Seperti diketahui, zat dapat digolongkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas.
  - a. Limbah padat adalah limbah yang berbentuk padat, contohnya limbah pasar, kotoran hewan atau manusia, limbah padat industri, dan blotong dari proses pengolahan tebu menjadi gula, dan lain sebagainya.
  - b. Limbah cair adalah limbah yang berada dalam fasa cair. Contoh limbah cair yaitu air bekas pencucian, air buangan usaha laundry, limbah cair yang berasal dari industri, limbah cair tahu, dan lain sebagainya.
  - c. Limbah gas adalah limbah yang berada dalam fasa gas, biasanya diperoleh dari hasil pembakaran. Contohnya limbah yang dikeluarkan dari cerobong asap suatu pabrik pengolahan.
2. Jenis limbah berdasarkan senyawa  
Jenis jenis limbah juga dapat digolongkan berdasarkan kandungan senyawanya. Ada limbah organik, ada pula limbah anorganik.
  - a. Limbah organik adalah limbah yang mengandung senyawa-senyawa organik atau yang berasal dari produk-produk makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Limbah organik cenderung lebih mudah ditangani karena dapat terdekomposisi menjadi senyawa organik melalui proses biologis (baik aerob maupun anaerob) secara cepat.

Contoh limbah organik misalnya tinja, kertas, limbah rumah jagal hewan, limbah pasar dari jenis dedaunan atau sayuran sisa, dan lain sebagainya.

- b. Limbah anorganik adalah limbah yang lebih banyak mengandung senyawa anorganik, biasanya cenderung lebih sulit ditangani. Contoh limbah anorganik misalnya kaca, plastik, logam berat, besi tua, dan lain sebagainya.
3. Jenis limbah berdasarkan sumbernya  
Berdasarkan sumbernya, jenis-jenis limbah dibedakan menjadi 2, yaitu limbah industri dan limbah domestik.
    1. Limbah industri adalah limbah yang dihasilkan dari proses industri. Contohnya limbah pabrik, limbah penambangan, limbah radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir, limbah rumah sakit, dan lain sebagainya. Limbah industri cenderung ditangani dengan serius karena pemerintah telah mengatur mekanismenya bagi setiap perusahaan (industri).
    2. Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan dari konsumsi rumah tangga. Contohnya kaleng-kaleng bekas keperluan rumah tangga, air cucian (detergen), kantong plastik, kardus bekas, dan lain sebagainya.
  4. Jenis limbah berdasarkan sifatnya.  
Limbah juga dapat digolongkan berdasarkan sifatnya dalam merusak atau mempengaruhi kenyamanan hidup manusia.

1. Limbah biasa adalah jenis limbah yang tidak menyebabkan kerusakan secara serius pada skala kecil dan jangka panjang. Limbah organik termasuk ke dalam jenis limbah biasa.
2. Limbah B3 atau limbah bahan berbahaya dan beracun adalah limbah yang dapat menyebabkan kerusakan serius meski pada skala kecil pada jangka pendek maupun panjang.

### 3. Pencemaran Lingkungan

Menurut Albert Napitupulu (2013 :6) Pencemaran lingkungan adalah suatu kondisi dimana terjadi perubahan dari bentuk asal keadaan yang lebih buruk. Perubahan bentuk tatanan dari kondisi asal ke kondisi yang buruk ini dapat terjadi sebagai akibat dari masuknya bahan-bahan pencemar atau polutan bersifat racun yang berbahaya bagi organisme hidup. Masalah lingkungan yang diakibatkan oleh pencemaran yaitu pencemaran udara, air dan tanah.

Menurut Soedarto (2013 :6) perusakan lingkungan merupakan semua tindakan yang dapat menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan

Menurut Munadjat Danusaputra (2006 :96) pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energi dan atau informasi masuk atau dimasukkan didalam lingkungan oleh kegiatan manusia secara alami dalam batas-batas dasar hingga mengakibatkan terjadinya

gangguan kerusakan dan atau penurunan mutu lingkungan.

Menurut N.H.T Siahaan (2004 :280), mengatakan di lihat dari segi ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut sudah tercemar bila memiliki beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Kalau suatu zat, organisme, atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (teintroduksi) kedalam sumber daya/ lingkungan tertentu.
2. Karenanya menghalang/ mengganggu kedalam sumber daya/ lingkungan tersebut.

Menurut **Pipih Sopiah (2011 : 71)**, menyatakan terdapat 3 (tiga) unsur dalam pencemaran, yaitu :

1. Sumber perubahan oleh kegiatan manusia atau proses alam
2. Bentuk perubahannya adalah berubahnya konsentrasi suatu bahan (hidup/mati) pada lingkungan.
3. Dan merosotnya fungsi lingkungan dalam menunjang kehidupan.

Dari pengertian dan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pencemaran dapat diartikan sebagai memasukkan kontaminan kedalam lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi manusia atau mahluk hidup lainnya. Kontaminan ini dapat berupa Zat kimia, energi seperti kebisingan, panas atau cahaya. Zat pencemar dapat berasal dari alami atau energi, tetapi dianggap kontaminan ketika melebihi tingkat alamiah.

### 1.5 Metode Penelitian

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode

kualitatif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena ingin melihat pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran lingkungan yang di sebabkan oleh limbah industri sawit.

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Mitra Agung Swadaya Desa Sungai Golang Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu.

#### **1.5.2 Informan Penelitian**

Adapun key informan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang penataan dan penataan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Kepala Tata Usaha Perusahaan industri sawit PT. Mitra Agung Swadaya.
4. Masyarakat sekitar PT. Mitra Agung Swadaya Desa Sungai Golang

#### **1.5.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, Menurut Creswell (2013 :4-5) penelitian

kualitatif adalah metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu tau sekelompok yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah sumber data primer dan skunder, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi partisipan dan wawancara mendalam.

#### **1.5.4 Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Adalah data pokok yang diperoleh setelah melakukan penelitian dari beberapa responden yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian permasalahan yang diteliti, yaitu meliputi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Mitra Agung Swadaya Kabupaten Indragiri Hulu, faktor-faktor yang mempengaruhi proses pengawasan PT. Mitra Agung Swadaya Kabupaten Indragiri Hulu serta mengenai indikator menentukan standar pengawasan, tindakan penilaian, melakukan tindakan perbaikan sanksi terhadap pelanggaran yang melanggar SOP yang telah ditetapkan.

##### **2. Data Sekunder**

Adalah data yang digunakan sebagai sarana pendukung untuk memahami masalah yang akan diteliti yang diperoleh oleh kantor Dinas Lingkungan Hidup dan PT. Mitra Agung Swadaya sebagai berikut:

- a. Gambaran umum tentang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau

- b. Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu.
- c. Dokumen laporan kegiatan pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup tahun anggaran 2017.
- d. Pedoman pengelolaan limbah industri kelapa sawit
- e. Surat edaran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

### 1.5.5 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan untuk menjawab permasalahan pengawasan pencemaran lingkungan (studi kasus limbah industri kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu) dalam penelitian ini adalah analisis dengan kualitatif Triangulasi.

## 1.6 Hasil

### 1.6.1 Pengawasan Pencemaran Lingkungan (Studi Kasus Limbah Industri Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu).

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan kedalam 3 (tiga) indikator yang dapat menerangkan bagaimana pengawasan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hulu, penulis meneliti dengan menggunakan teori pengawasan menurut Manullang dengan indikatornya adalah sebagai berikut menetapkan standar, mengadakan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan.

#### a. Menetapkan Standar

Dalam melakukan pengawasan harus ada standar sehingga dapat menilai penyimpangan yang ada, dimana standar ini dikenal juga sebagai sebuah ketentuan yang harus di ikuti.

Adapun standar yang masuk dalam pengawasan ini yaitu menyusun kebijakan, menentukan standar waktu dalam pengawasan, sosialisasi, dan adanya pembagian tugas dalam pengawasan.

#### b. Mengadakan Penilaian

Tindakan penilaian terhadap pekerjaan yang dilakukan guna mengetahui penyimpangan yang telah terjadi terhadap standar yang telah ditentukan atau ditetapkan oleh dinas lingkungan hidup kabupaten indragiri hulu, tindakan penilaian ini berdasarkan standar atau persyaratan baku mutu limbah yaitu keputusan menteri lingkungan hidup nomor 5 tahun 2014 Penilaian pekerjaan yang dilakukan juga bermanfaat untuk menentukan langkah apa saja yang akan diambil untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang sama

Adapun kegiatan dalam mengadakan tindakan penilaian ini ada 3 yaitu

- a. laporan tertulis yang dimana laporan ini diperoleh dari laporan-laporan yang diberikan oleh masyarakat atau pihak industri kelapa sawit di Kabupaten Indragiri Hulu. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dimana masih adanya perusahaan yang terlambat dalam memberikan laporan kegiatan mengenai pengelolaan limbah dan juga masih ada perusahaan industri kelapa sawit yang belum memberikan laporan mengenai kegiatan pengelolaan limbah kepada Dinas Lingkungan Hidup.

- b. Laporan lisan yang dimana laporan ini disampaikan secara oral bentuknya adalah suara/bunyi yang terdengar yang didapat dari setiap pihak baik dari tim pengawasan Dinas Lingkungan Hidup maupun dari PT. Mitra Agung Swadaya.
- c. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan cara mendatangi dan melakukan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan limbah industri kelapa sawit tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Hal ini dilakukan untuk melihat hasil pengelolaan yang telah dilakukan sesuai atau tidak nya dengan SOP yang telah ditetapkan.

**c. Mengadakan Perbaikan**

Tindakan perbaikan yaitu tindakan untuk menghilangkan penyimpangan yang dimana tindakan ini dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PT. Mitra Agung Swadaya hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan yang sama.

Adapun kegiatan dalam tindakan perbaikan ini yaitu sebagai berikut

- a. Tindakan pembinaan yang dimana dalam tindakan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh PT.MAS
- b. Memberikan sanksi Setiap kegiatan atau sistem operasi dapat saja menyimpang dari operasi standar karena berbagai alasan sehingga menghasilkan pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. Dalam melakukan tindakan perbaikan itu sendiri

haruslah benar-benar dilakukan supaya tidak terjadi pelanggaran peraturan yang telah dibuat sebelumnya hal ini dilakukan dinas lingkungan Hidup dengan memberikan surat teguran kepada PT. Mitra Agung Swadaya yang dimana pengelolaan limbah melewati batas mutu limbah sehingga diperlukannya perbaikan.

**1.6.2 Faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Pecemaran Lingkungan (Studi Kasus Limbah Industri Sawit di Kabupaten Indragiri Hulu).**

Adapun faktor-faktor penghambat dalam melakukan pengawasan pencemaran lingkungan hidup yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia (SDM)  
SDM merupakan salah satu faktor penting dalam melakukan pengawasan sehingga terlaksananya pengawasan yang dilakukan dinas lingkungan hidup terhadap perusahaan industri kelapa sawit dimana dalam SDM ini diperlukan kualitas petugas yang handal dalam bidangnya dan jumlah petugas dalam melakukan pengawasan yang dimana perusahaan yang di awasi tidak sedikit.
- b. Anggaran / biaya  
Anggaran atau biaya merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan organisasi. Hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan membutuhkan biaya untuk membiayai kegiatan operasional pengawasan dilapangan.

- c. Partisipasi masyarakat
- Salah satu aktor penting dalam pengawasan yaitu masyarakat hal ini dikarenakan masyarakat lah yang merasakan dampak dari adanya kegiatan industri kelapa sawit, untuk itu peran penting masyarakat dalam membantu dinas lingkungan hidup melakukan pengawasan apabila terjadinya suatu pelanggaran sehingga bisa melaporkan kepada dinas lingkungan hidup

### 1.7 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan tentang pengawasan pencemaran lingkungan (studi kasus limbah industri kelapa sawit di kabupaten indragiri hulu) dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan industri kelapa sawit di kabupaten indragiri hulu belum optimal, hal ini dikarenakan masih banyak didapati industri kelapa sawit yang masih melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengelolaan limbah industri sawit dan juga masih meresahkan masyarakat sekitar lokasi industri kelapa sawit. Namun dalam pelaksanaan pengelolaan limbah industri masih adanya beberapa industri kelapa sawit yang melakukan penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di Kabupaten Indragiri Hulu. Kelemahan dalam pengawasan terhadap limbah industri kelapa sawit ini belum adanya standar waktu yang efektif

dalam pengawasan langsung kelapangan dan juga belum adanya sosialisasi yang dilakukan dan juga sanksi yang belum tegas terhadap perusahaan industri kelapa sawit.

2. Sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi dalam pengawasan yang dilakukan seperti kualitas petugas dan jumlah petugas yang mendukung dalam melakukan tindakan pengawasan karena apabila petugas pengawasan tidak mempunyai kualitas maka tingkat keberhasilan dalam melakukan pengawasan akan kecil dan juga dalam menungjang kegiatan pengawasan faktor dana juga dapat mempengaruhi dalam keberhasilan pengawasan yang dilakukan karena apabila dana terkendala maka tidak akan berjalan dengan lancar, serta partisipasi dari masyarakat sebagai pendukung dalam kegiatan paengawasan juga tidak kalah pentingnya yang dimana peran dari masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam mengawasi apa saja yang terjadi di sekitar lokasi industri kelapa sawit yang dimana dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pengawasan

### 1.8 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan dalam penelitian yang berjudul Pengawasan pencemaan lingkungan (studi kasus limbah industri kelapa sawit di kabupaten indragiri hulu), penulis memberikan saran-saran

yang sifatnya membantu yaitu sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia juga dapat mempengaruhi dalam pengawasan yang dilakukan seperti kualitas petugas dan jumlah petugas yang mendukung dalam melakukan tindakan pengawasan karena apabila petugas pengawasan tidak mempunyai kualitas maka tingkat keberhasilan dalam melakukan pengawasan akan kecil dan juga dalam menungjang kegiatan pengawasan faktor dana juga dapat mempengaruhi dalam keberhasilan pengawasan yang dilakukan karena apabila dana terkendala maka tidak akan berjalan dengan lancar, serta partisipasi dari masyarakat sebagai pendukung dalam kegiatan pengawasan juga tidak kalah pentingnya yang dimana peran dari masyarakat ini sangat dibutuhkan dalam mengawasi apa saja yang terjadi di sekitar lokasi industri kelapa sawit yang dimana dapat membantu Dinas Lingkungan Hidup dalam menjalankan pengawasan.
2. Pengawasan terhadap limbah industri kelapa sawit ini hendaknya disertai dengan sosialisasi terhadap penanggung jawab usaha agar mereka ikut serta dalam menjaga lingkungan sekitar dan juga pemerintah daerah juga memberikan solusi atau terobosan baru terhadap limbah industri kelapa sawit yang dimana limbah yang di lihat selama ini dinilai memberikan dampak negatif juga memberikan dampak positif yang dimana

limbah ini dapat dimanfaatkan sebagai pupuk, maupun sebagai sumber energi terbarukan

3. Dalam melakukan pengawasan sebaiknya pemerintah daerah memperhatikan segala kekurangan seperti memperhatikan jumlah personil yang memiliki keahlian didalam bidangnya dan anggaran hal ini dikarenakan dalam melaksanakan kegiatan akan terkendala apabila dana nya sedikit sehingga dalam melaksanakan pengawasan langsung akan berkurang tentu saja akan berdampak pada kurang efektifnya pengawasan. Hal ini di karenakan pengawasan langsung dilakukan supaya bisa langsung menilai apakah limbah yang diolah sudah sesuai atau tidak nya standar yang telah ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Rulam. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arifin, R., dan Helmi, M. 2016. *Pengantar Manajemen*. Malang: EMPATDUA
- Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Danusaputra, Munajat. 2006. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Binacipta
- Edward. 2011. *Analisis kebijakan publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media

- Kartikawan. 2007. *Mengelola Lingkungan Hidup Yang Sehat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Of Solid Waste Management New York
- Koontz, H., Cyril O'Donnell. 2013. *Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Kristanto, Philip. 2013. *Ekologi Industri*. Yogyakarta: Andi
- Manullang. 2015. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sastrawijaya. 2009. *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Soemarwoto, Otto. 2009. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University
- Soedarto. 2013. *Lingkungan dan Kesehatan*. Jakarta: Sagung Seto
- Sopiah, Pipih. 2011. *Aku Cinta Lingkungan*. Bandung: CV Bankit Citra Persada
- Sondang, Siagian P, 2012. *Manajemen Strategik*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Supardi. 2006. *Hukum Lingkungan Indonesia Sebuah Pengantar*. Edisi I. Jakarta: Sinar Grafika
- Jurnal
- Herlambang, Arie, *Pencemaran Air dan Strategi Penanggulangannya*. Jurnal Peneliti Pusat Teknologi Lingkungan, BPPT Vol. 2, No. 1, 2006, (<https://www.researchgate.net>).
- Sapto, Sigit Nugroho, *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perspektif Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun Vol. 14, No. 2, September 2013, (<https://scholar.google.com/citation> s).
- Pahan, I, *Panduan Lengkap Kelapa Sawit*. 3, Jakarta : Penebar Swadaya, 2007. Jurnal Departemen Agronomi dan Horiticultura Vol. 5, No. 3, 2017, ([http://journal ipb.ac.id](http://journal.ipb.ac.id))